



C A T A T A N

dari  
desa  
tentang  
desa

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Catatan Dari Desa Tentang Desa / editor,  
Bernadinus Steny. -- Cet. 1. -- Palu :  
Perkumpulan Bantaya, 2005.  
xii + 117 hlm. ; 17,6 x 25 cm.

**ISBN: 979-25-3780-5**

I. Desa. I. Steny, Bernadinus.

352.007 22

### Penulis

- Agus Tagunu
- Sammy J. Manopo
- Abd. Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin
- Moh. Amin Dj. Naraibo
- Oktavianus B. Dongka
- Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab dan Pos Informasi Kampung
- Kadi Kalahe
- Adam
- Tinus Yolungata
- Asrudin
- Suleman Gena, Sumarno (Alm.) dan Mardin
- Ahmad Zein
- Bahrhun Tandesura
- Oktavianus Aturea
- Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya
- Syafruddin AB. Juma, H. Andi Ando Pelang, Nurlili, Mustamin, M. Rais, Maharuddin, Kiraman, Anton dan Wing Prabowo
- Marthen Tatengnge'

### Layout dan Tata Letak

Didin Suryadin

### Design Sampul

Swartato

Cetakan Pertama, November 2005

### Penerbit

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

# **Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili**

Oleh. Moh. Amin Dj. Naraibo

## **Pengantar**

Pembangunan dan pembaruan desa merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah menuju terbentuknya otonomi desa. Untuk membangun kinerja pemerintahan desa dalam hal ini Desa Persiapan Bulili, Kecamatan Palolo Kabupaten Donggala, maka pemberdayaan aparatur dan lembaga pemerintahan, lembaga adat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan merupakan sesuatu yang mendesak. Lembaga-lembaga ini merupakan kesatuan struktur yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa, Ketentuan Hukum Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala telah banyak menjabarkan pelaksanaan tugas pemerintahan di desa. Ketentuan-ketentuan ini juga mengilhami Desa Persiapan Bulili untuk menata dan menyempurnakan desanya. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin baik.

## **Keadaan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili**

Desa Persiapan Bulili merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Rahmat pada tahun 2002 yang sebelumnya hanya sebuah dusun yakni Dusun V Watu Bose. Setelah tahun 2002 dusun ini dipersiapkan menjadi desa persiapan yang diberi nama Desa Persiapan Bulili dimana secara resmi menjadi desa persiapan disahkan oleh Bupati Donggala pada tanggal 14 Februari 2004 melalui SK No. 188.45/0125/Bag. Pemdes/ 2004. Desa persiapan Bulili berpenduduk 1525 jiwa, jumlah kepala keluarga adalah 305 KK. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka komposisinya laki-laki terdiri dari 738 jiwa dan perempuan 787 jiwa. Sedangkan pembagian berdasarkan usia selengkapnya ada di dalam tabel.

Luas wilayahnya adalah 13.827.825 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sopus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rahmat;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ranteleda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu.

Desa Bulili ini didiami oleh beragam suku yaitu Suku Bugis, Kaili dan Suku Da'a, yang sejak sebelum dimekarkan menjadi desa sudah mendiami Desa Persiapan Bulili.

No.	Usia / Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	37	34	71
2.	13 – 4 bulan	56	66	122
3.	5 – 6 tahun	44	57	101
4.	7 – 12 tahun	80	100	180
5.	13 – 15 tahun	55	52	107
6.	16 – 18 tahun	47	41	88
7.	19 – 25 tahun	77	101	178
8.	26 – 35 tahun	113	128	241
9.	36 – 45 tahun	88	85	173
10.	46 – 50 tahun	41	32	73
11.	51 – 60 tahun	40	42	82
12.	61 – 75 tahun	35	26	61
13.	Lebih dari 75 tahun	25	23	48
	<b>Jumlah</b>	<b>738</b>	<b>787</b>	<b>1.525 jiwa</b>

Sebagai desa persiapan, maka pelaksanaan tugas pemerintahan Desa Persiapan Bulili masih sangat dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Desa Rahmat yang memang belum begitu rela melepas secara keseluruhan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah Desa Persiapan Bulili. Hal ini dapat dilihat masih berperannya Kepala Dusun V Watu Bosa dalam menjalankan tugasnya. Realitas seperti terjadi karena masih banyaknya peraturan daerah yang belum dipahami oleh pemerintahan Desa Rahmat. Karena itu, kebutuhan akan pembaharuan desa khususnya pembaharuan kelembagaan desa merupakan sesuatu yang mendesak di Bulili. Selama ini aparatur dan kelembagaan desa belum memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat. Hal ini dapat mudah disaksikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Masyarakat mengalami berbagai hambatan ketika harus menyelesaikan persoalannya di desa, entah persoalan administrasi maupun hukum. Lembaga-lembaga pendukung seperti adat dan keagamaan pun belum berfungsi secara maksimal. Singkatnya, pemerintahan desa belum mempunyai program yang berpihak kepada masyarakat.

Selain masalah kualitas pelayanan masyarakat yang tidak memadai, dari segi manajemen pemerintahan, Kepala Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya belum mempunyai satu sistem kerja yang baik yang satu sama lainnya mendukung dan saling memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas masing-masing. Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur), dalam hal ini yang perannya sangat besar dalam menata struktur pemerintahan belum begitu berfungsi dengan baik. Hal ini membuat sistem penataan struktur pemerintahan mulai dari tingkat yang terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat desa belum tertata. Kaur sebetulnya memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan desa, membentuk dan menatanya.

Namun demikian, persoalan-persoalan di atas juga perlu diperiksa sebabnya. pemerintahan desa persiapan Bulili, baik kepala urusan pemerintahan maupun semua perangkat desa lainnya, masih bersifat pejabat sementara sehingga mereka masih canggung menjalankan aktivitas pemerintahan. Pemerintahan sementara ini dibatasi oleh kewenangannya yang sementara. Apalagi Desa Persiapan Bulili belum lama diresmikan oleh Bupati Donggala, sehingga pemerintah desa memang belum mempunyai program yang memadai. Tetapi meskipun ada kendala seperti itu, pemerintahan desa persiapan Bulili mestinya tetap berjalan efektif. Input informasi tentang sistem pemerintahan desa dari berbagai Undang-undang dan Peraturan Daerah terkait harus diperbanyak dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat desa. Jika saja itu dilakukan, maka stagnasi Desa Persiapan Bulili dari tahun 2002 sampai diresmikan pada tanggal 14 Februari 2004 tidak perlu terjadi.

### **Menyempitnya Lahan Pertanian Desa Persiapan**

Persoalan kelembagaan pemerintahan Desa Persiapan Bulili juga diikuti oleh kompleksitas persoalan di tingkat masyarakat. Salah satu persoalan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan perekonomian di desa adalah akses terhadap lahan garapan. Sama seperti desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah pertanian sebagai sektor terbesar dalam klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa, sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu desa. Untuk memperoleh lahan tersebut dapat ditentukan oleh luas wilayah desa bersangkutan. Di sisi lain tingkat kelahiran yang tinggi membuat jumlah penduduk makin bertambah sementara luas lahan tidak bertambah. Masalah-masalah ini sedang terjadi di Desa Persiapan Bulili.

Sebagian besar petani Bulili membuka kebun Kakao. Dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat terhadap tanah pertanian untuk kebun Kakao semakin meningkat. Kebutuhan tersebut didorong oleh rendahnya kemampuan petani untuk memaksimalkan hasil Kakao dari tanah pertaniannya. Salah satu sebabnya adalah masih banyak petani yang mengelola kebun Kakao dengan cara tradisional yang dari segi hasil dan kualitasnya sangat terbatas. Contohnya, petani Kakao belum mampu memproduksi biji Kakao yang berkualitas tinggi, sehingga harga jualnya belum bisa

bersaing di pasar ekspor. Pada giliran berikutnya, penjualan Kakao akhirnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Desakan kebutuhan atas tanah juga disumbang oleh anggapan tradisional yang menyatakan, bahwa keberhasilan sebagai petani Kakao dapat dilihat dari kebun yang luas. Sehingga petani berlomba-lomba menambah jatah lahannya. Selain itu, dulu ketika tanah masih luas, banyak petani menjual tanahnya. Namun saat harga Kakao melangit warga Desa Persiapan Bulili kemudian mencari lahan baru untuk ditanami lagi dengan Kakao.

Petani kakao yang kesulitan untuk mendapatkan lahan baru akhirnya membuka hutan yang berada dikawasan hutan TNLL. Hal ini sama dengan membuka konflik baru karena setiap saat bidang tanah itu bisa diambil lagi oleh Balai Taman Nasional.

## Penutup

Gambaran keadaan Desa Persiapan Bulili mestinya merupakan gambaran tugas Pemerintah Desa. Pemerintah Desa seharusnya melakukan upaya negoisasi dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu agar masyarakat bisa memanfaatkan kawasan tersebut. Jika upaya itu berhasil maka hukum adat yang selama ini terlupakan harus didayagunakan lagi untuk mengontrol pemanfaatan tersebut agar tidak merusak isi hutan.

Selain itu Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dapat bekerjasama untuk merumuskan peraturan-peraturan pemanfaatan hutan yang ada. Persiapan kelembagaan dan perangkat hukum desa sangat perlu karena kebutuhan lahan yang semakin besar menuntut sistem kerja pemerintahan yang baik. Selain untuk keperluan menarik pajak juga menjamin pengelolaan sumber daya yang ada tetap berada dalam garis ekologis. Selain itu, menetapkan batas luas lahan juga harus merupakan prioritas pemerintah. Sehingga warga yang tidak memiliki tanah atau kurang tanah tidak harus membuka hutan dan merusak lingkungan. Disitulah peran rill Pemerintah Desa.